

Mengelola **INFLASI**

dalam **Ekonomi Indonesia**
yang **Rentan Guncangan**



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Rudy C Tarumingkeng : *Mengelola Inflasi dalam Ekonomi Indonesia
yang Rentan Guncangan*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

5 Maret 2026

MENGELOLA INFLASI DALAM EKONOMI INDONESIA YANG RENTAN GUNCANGAN

Abstrak

Inflasi di Indonesia bukan sekadar “naik-turun angka Indeks Harga Konsumen (IHK)”, melainkan cermin dari **kerentanan struktural**: ketergantungan pada komoditas pangan–energi tertentu, biaya logistik negara kepulauan, variabilitas iklim, bencana, serta transmisi guncangan global melalui kurs dan harga impor. Karena itu, strategi pengelolaan inflasi yang efektif harus melampaui instrumen suku bunga: ia menuntut **kebijakan campuran (policy mix)** antara moneter–fiskal–sektoral, ditopang koordinasi pusat–daerah (TPIP–TPID), manajemen ekspektasi publik, dan desain kebijakan harga yang memperhatikan **timing–sequencing–magnitude** agar gejolak tidak menjadi spiral inflasi. Perkembangan terkini memperlihatkan dinamika khas Indonesia: inflasi 2025 terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, tetapi awal 2026 inflasi tahunan meningkat (Februari 2026: 4,76% yoy) dipengaruhi faktor musiman dan base effect, sehingga menegaskan pentingnya respons yang presisi: membedakan inflasi inti dari volatile food dan administered prices serta menempatkan perlindungan daya beli sebagai “peredam” tanpa merusak kredibilitas stabilitas harga. ([Bank Indonesia](#))

Kata kunci: inflasi, volatile food, administered prices, inflasi inti, koordinasi TPIP–TPID, strategi 4K, ekspektasi inflasi, stabilisasi kurs, subsidi energi, bantuan pangan.

1. Mengapa Inflasi Indonesia “Rentan Guncangan”?

Secara teori, inflasi dapat didorong oleh **tarikan permintaan (demand-pull)**, **dorongan biaya (cost-push)**, atau gabungan keduanya. Namun, Indonesia sering mengalami inflasi sebagai **peristiwa guncangan**: harga pangan melonjak karena cuaca dan distribusi; biaya transport meningkat karena energi; atau tekanan harga muncul karena pelemahan kurs dan imported inflation. Dalam ekonomi yang rentan guncangan, inflasi tidak selalu “mengabarkan ekonomi terlalu panas”, tetapi sering “mengabarkan rantai pasok terganggu” atau “harga yang diatur perlu penyesuaian”.

Data terbaru menegaskan pentingnya kaca mata ini. Pada Februari 2026, inflasi tahunan mencapai **4,76% (yoy)**, sementara inflasi inti **2,63% (yoy)**—artinya, sebagian tekanan datang dari komponen yang lebih bergejolak di luar inti. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sisi lain, Indonesia memiliki rezim sasaran inflasi **2,5±1%** (yang ekuivalen dengan rentang 1,5–3,5%). Sasaran ini menuntut kebijakan yang menjaga stabilitas harga tanpa mematikan pertumbuhan. ([Bank Indonesia](#))

2. Anatomi Kerentanan: Sumber Guncangan Inflasi Indonesia

2.1. Pangan bergejolak (volatile food) sebagai “jantung” inflasi persepsi

Bagi banyak rumah tangga, inflasi terasa bukan dari indeks agregat, tetapi dari harga beras, cabai, bawang, daging ayam, telur. Bank Indonesia juga mencatat bahwa pada periode tertentu inflasi volatile

food bisa relatif tinggi dan dipengaruhi gangguan cuaca serta pasokan. ([Bank Indonesia](#))

Indonesia merespons kerentanan ini dengan koordinasi TPIP–TPID serta strategi pengendalian inflasi pangan. Dalam High Level Meeting TPIP (29 Januari 2026), Pemerintah dan BI menegaskan target **inflasi volatile food 3,0–5,0%** serta penguatan pasokan dan distribusi antarwilayah. ([Bank Indonesia](#))

2.2. Energi dan administered prices: inflasi yang “dipilih waktunya”

Sebagian harga penting dipengaruhi kebijakan (tarif listrik, BBM tertentu, tarif transport tertentu). Karena itu, inflasi Indonesia sering terkait keputusan “kapan” dan “seberapa besar” penyesuaian harga diatur. HLM TPIP secara eksplisit menekankan perlunya kebijakan administered prices yang mempertimbangkan **timing, sequencing, dan magnitude** untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli. ([Bank Indonesia](#))

Di APBN, subsidi energi juga dipahami sebagai instrumen stabilisasi dan distribusi untuk menjaga keterjangkauan energi, walau diakui tantangan ketepatan sasaran. Dalam RAPBN 2026, belanja subsidi direncanakan Rp318,886 triliun, terdiri atas **Subsidi Energi Rp210,0608 triliun** dan Subsidi Non-Energi Rp108,8254 triliun. ([Kemenkeu Media](#))

2.3. Kurs dan imported inflation: saluran guncangan global

Dalam ekonomi terbuka, pelemahan rupiah dapat menaikkan harga barang impor dan input produksi. Bank Indonesia mengaitkan stabilisasi nilai tukar dengan konsistensi pencapaian sasaran inflasi; BI menempuh langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar NDF/DNDF dan spot untuk menjaga volatilitas rupiah. ([Bank Indonesia](#))

2.4. Musiman (HBKN) dan ekspektasi: inflasi “karena ramai”

Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) memengaruhi permintaan dan distribusi. Pada Desember 2025, BI menilai inflasi meningkat terutama

disumbang volatile food dan administered prices dipengaruhi gangguan cuaca, input ternak, dan peningkatan permintaan HBKN. ([Bank Indonesia](#))

Artinya, inflasi Indonesia kerap memiliki pola “ramai–ketat pasokan–harga naik”, sehingga responsnya perlu gabungan: supply management, operasi pasar, dan komunikasi.

3. Membaca Angka: Apa yang Terjadi 2025–Awal 2026?

Inflasi 2025 tercatat **2,92% (yoy)** dan disebut “terjaga dalam sasaran” $2,5 \pm 1\%$. ([Bank Indonesia](#))

Namun, awal 2026 menunjukkan peningkatan tahunan: Januari 2026 secara bulanan deflasi $-0,15\%$ (mtm) tetapi inflasi tahunan **3,55% (yoy)**; BI menilai perkembangan ini dipengaruhi deflasi pada volatile food dan administered prices serta faktor base effect (misalnya kebijakan diskon tarif listrik pada periode sebelumnya). ([Bank Indonesia](#))

Pada Februari 2026, BPS melaporkan inflasi tahunan **4,76% (yoy)** dengan IHK 110,50; inflasi bulanan **0,68% (mtm)**; dan inflasi inti **2,63% (yoy)**. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi kebijakan:

Kenaikan headline perlu dibedah: apakah dominan base effect, pangan bergejolak, administered prices, atau permintaan inti.

Jika inflasi inti relatif terkendali, fokus kebijakan sering bergeser ke stabilisasi pasokan dan ekspektasi, bukan sekadar menaikkan suku bunga secara agresif. (Ini tidak berarti suku bunga tidak penting; artinya suku bunga bukan satu-satunya “obat”.)

4. Arsitektur Pengendalian Inflasi Indonesia: Moneter + Koordinasi Pusat–Daerah

4.1. Sasaran inflasi dan kredibilitas kebijakan

Sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ untuk 2026 tercantum sebagai target resmi. ([Bank Indonesia](#))

BI juga berulang menyatakan keyakinan inflasi 2026–2027 akan tetap berada dalam kisaran sasaran, ditopang konsistensi kebijakan moneter dan sinergi TPIP–TPID serta program ketahanan pangan. ([Bank Indonesia](#))

4.2. Koordinasi TPIP–TPID dan “Strategi 4K”

Dalam praktik Indonesia, pengendalian inflasi—khususnya pangan—dijalankan melalui TPIP/TPID dengan kerangka yang populer disebut **4K**: *keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif*. Kerangka 4K dipakai luas dalam berbagai publikasi pemerintah/daerah dan menjadi bahasa bersama lintas lembaga. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

5. Lima Langkah Strategis 2026: “Blueprint Operasional” dari HLM TPIP

Rilis resmi BI tentang HLM TPIP (29 Januari 2026) sangat penting karena merangkum strategi menjadi langkah operasional:

Menjaga inflasi 2026 pada kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$

Menjaga inflasi volatile food dalam kisaran 3,0–5,0%

Memperkuat koordinasi pusat–daerah untuk pasokan antarwaktu–antarwilayah, logistik, kebijakan administered prices (timing–sequencing–magnitude), serta komunikasi ekspektasi

Memperkuat dukungan infrastruktur/logistik pascabencana

Menjaga daya beli melalui diskon transport/tol saat HBKN dan **bantuan pangan Februari–Maret 2026** ([Bank Indonesia](#))

Perhatikan: langkah-langkah tersebut menggabungkan **stabilisasi harga** (inflasi target), **stabilisasi pangan** (VF), **kebijakan harga yang diatur** (administered prices), **ketahanan logistik-bencana**, dan **perlindungan daya beli**. Ini tepat menggambarkan inflasi Indonesia yang “rentan guncangan”: perlu kombinasi instrumen.

6. Instrumen Moneter: Apa yang Bisa dan Tidak Bisa Dilakukan Suku Bunga

6.1. Suku bunga sebagai jangkar ekspektasi

Dalam inflation targeting, suku bunga kebijakan berfungsi menjangkar ekspektasi inflasi. BI menautkan rendahnya inflasi inti dengan konsistensi suku bunga dalam menjangkar ekspektasi, serta imported inflation yang terkendali. ([Bank Indonesia](#))

Namun, pada inflasi yang dominan supply shock (pangan/energi), menaikkan suku bunga terlalu keras bisa menekan permintaan tanpa menyembuhkan sumber masalah (misalnya panen terganggu atau logistik tersendat). Karena itu, kebijakan moneter biasanya bergerak **terukur**, sambil mengandalkan koordinasi pasokan.

6.2. Stabilitas rupiah sebagai “kebijakan anti-inflasi” yang sering dilupakan

Ketika kurs bergejolak, biaya impor naik dan memicu imported inflation. BI menyebut intervensi NDF/DNDF dan spot untuk menjaga volatilitas rupiah dan konsisten dengan sasaran inflasi 2026. ([Bank Indonesia](#))

Dalam ekonomi yang rentan guncangan, stabilisasi kurs bukan sekadar isu pasar keuangan, melainkan bagian dari pengendalian inflasi: menjaga agar guncangan global tidak langsung “diterjemahkan” menjadi kenaikan harga domestik.

6.3. Operasi moneter dan likuiditas

BI juga menekankan penguatan strategi operasi moneter pro-market dan kebijakan moneter yang tetap menjaga stabilitas. ([Bank Indonesia](#)) Bagi pembaca non-spesialis: ini berarti BI bukan hanya “mengubah angka suku bunga”, tetapi juga mengelola likuiditas agar transmisi kebijakan berjalan dan gejolak tidak membesar.

7. Instrumen Fiskal & Administratif: Subsidi, Stabilisasi, dan “Kebijakan Harga yang Bijak”

7.1. Subsidi energi: penahan guncangan, tetapi harus tepat sasaran

Nota Keuangan RAPBN 2026 menggambarkan subsidi energi dan kompensasi sebagai instrumen distribusi–stabilisasi untuk menjaga daya beli, daya saing, dan stabilitas makro; namun disebut pula bahwa penyaluran belum sepenuhnya tepat sasaran sehingga perlu didorong lebih berkeadilan. ([Kemenkeu Media](#))

Inilah trade-off klasik:

Jika subsidi terlalu kecil atau penyesuaian harga terlalu cepat, inflasi melonjak.

Jika subsidi terlalu besar dan tidak tepat sasaran, beban fiskal meningkat dan ruang belanja produktif menyempit.

Karena itu HLM TPIP menekankan *timing–sequencing–magnitude* untuk kebijakan administered prices. ([Bank Indonesia](#))

7.2. Bantuan pangan sebagai “penahan inflasi dari sisi permintaan” (secara halus)

Salah satu pelajaran penting ekonomi biaya hidup: pemerintah bisa meredam tekanan inflasi pangan bukan hanya dengan menambah pasokan, tetapi juga dengan mengurangi tekanan permintaan efektif kelompok rentan melalui bantuan yang tepat sasaran.

Media Keuangan Kemenkeu menjelaskan paket bantuan pangan Ramadan–Idulfitri 2026: **35,04 juta KPM** (desil 1–4) menerima **10 kg beras + 2 liter minyak goreng**, disalurkan sekaligus untuk Februari–Maret 2026; anggaran disiapkan **Rp14,09 triliun**; dan skema ini diharapkan membantu stabilisasi harga karena sebagian kebutuhan dipenuhi lewat bantuan sehingga tekanan permintaan pasar berkurang. ([Media Keuangan](#))

Secara akademik, ini menarik: bantuan sosial yang dirancang baik dapat berperan ganda—**perlindungan sosial** sekaligus **stabilisator inflasi pangan** (melalui kanal permintaan dan ekspektasi).

8. Stabilisasi Pangan: Cadangan, Operasi Pasar, dan “Manajemen Beras” sebagai Kebijakan Makro

Indonesia sering mengelola inflasi melalui manajemen komoditas strategis, terutama beras. Tahun 2026, program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) beras kembali digulirkan. Bapanas memaparkan ketentuan harga beras SPHP di berbagai wilayah, batas pembelian konsumen, serta menyebut realisasi penjualan SPHP 2025 yang diperpanjang hingga akhir Februari mencapai **1,025 juta ton** dan turut menjaga inflasi beras; bahkan disebut inflasi beras bulanan awal 2026 lebih stabil: Januari **0,16%**, Februari **0,43%**. ([Badan Pangan Nasional](#))

Dari sudut pandang pengendalian inflasi, SPHP bekerja melalui tiga mekanisme:

Menambah pasokan efektif di harga terjangkau (mengurangi peluang lonjakan),

Membentuk ekspektasi bahwa barang tersedia (mengurangi panic buying),

Mengoreksi struktur pasar ketika rantai distribusi memunculkan margin berlebihan.

9. Dimensi Daerah: Inflasi Indonesia Bukan Satu Angka

BPS menunjukkan variasi provinsi/kabupaten: Februari 2026 inflasi y-o-y tertinggi di Provinsi Aceh **6,94%**, terendah Papua Pegunungan **0,63%**. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Artinya, strategi pengendalian inflasi yang efektif harus memperlakukan Indonesia sebagai "150-an pasar" (kota IHK) dengan problem distribusi berbeda-beda.

Di sinilah TPID relevan: mereka menjalankan operasi pasar, pasar murah, sidak, fasilitasi distribusi antarwilayah, dan komunikasi. Kerangka 4K menjadi pedoman praktik. ([Kaltim Prov](#))

10. Mengelola Ekspektasi: Inflasi sebagai Fenomena Psikologi Sosial-Ekonomi

Dalam banyak episode inflasi, yang berbahaya bukan hanya kenaikan harga awal, tetapi **efek putaran kedua (second-round effects)**:

Pedagang menaikkan harga karena memperkirakan harga akan terus naik.

Pekerja menuntut upah lebih tinggi karena memperkirakan inflasi berlanjut.

Perusahaan menaikkan harga karena biaya input diprediksi naik.

Karena itu, HLM TPIP menempatkan **komunikasi** sebagai pilar: memperkuat sinergi kebijakan dan komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. ([Bank Indonesia](#))

Dalam bahasa sederhana: pemerintah–BI perlu “memenangkan narasi berbasis data” agar publik percaya bahwa pasokan aman, kebijakan siap, dan lonjakan tidak permanen.

11. Kerangka Praktis: Siklus Ketahanan Inflasi untuk Ekonomi Rentan Guncangan

Berikut kerangka operasional yang dapat dipakai sebagai “model ajar” atau pedoman analitis:

Tahap 1 — Deteksi dini (Early warning)

pantau harga harian komoditas kunci, stok, cuaca, biaya logistik;

identifikasi provinsi defisit dan titik kemacetan.

Tahap 2 — Pencegahan pasokan (Prevention)

kontrak pasokan antarwilayah, dukungan transportasi, percepatan panen/pasca panen;

siapkan buffer stock dan jalur distribusi cadangan.

Tahap 3 — Kontainmen (Containment)

operasi pasar/pasar murah terarah, SPHP, pengawasan margin;

komunikasi publik intensif: stok aman, jalur distribusi berjalan.

Tahap 4 — Perlindungan daya beli (Targeted relief)

bansos pangan/tunai yang presisi (mis. skema Ramadan–Idulfitri 2026) untuk meredam tekanan pada kelompok rentan dan menahan inflasi persepsi. ([Media Keuangan](#))

Tahap 5 — Normalisasi (Normalization)

evaluasi kapan intervensi dikurangi;

pastikan harga kembali ke tren tanpa menciptakan distorsi panjang.

Tahap 6 — Pembelajaran kebijakan (Learning)

audit kebocoran, efektivitas logistik, kualitas data penerima;

jadikan hasilnya peta jalan TPID/TPIP berikutnya.

Kerangka ini sejalan dengan logika HLM TPIP 2026: menjaga target headline dan VF, memperkuat distribusi-logistik, mengatur administered prices secara tepat waktu, dan menjaga daya beli. ([Bank Indonesia](#))

12. Tantangan Besar ke Depan: Menang Inflasi Tanpa Mengorbankan Pertumbuhan

12.1. Menjaga ruang fiskal di tengah kebutuhan subsidi

RAPBN 2026 menempatkan subsidi energi besar (Rp210,0608 triliun) sebagai penyangga. Namun, belanja sebesar ini menuntut reformasi ketepatan sasaran agar stabilisasi tidak berubah menjadi beban kronis. ([Kemenkeu Media](#))

12.2. Mengurangi “inflasi logistik” secara struktural

Negara kepulauan memerlukan investasi logistik pangan: cold chain, gudang, pelabuhan, dan distribusi last mile. Tanpa itu, setiap gangguan cuaca mudah menjadi lonjakan harga di wilayah defisit.

12.3. Konsistensi moneter–kurs

BI menautkan stabilisasi rupiah dengan imported inflation dan pencapaian target inflasi. Dalam periode guncangan global, kredibilitas stabilisasi kurs menjadi bagian dari strategi inflasi. ([Bank Indonesia](#))

13. Kesimpulan

Mengelola inflasi di Indonesia yang rentan guncangan berarti mengelola **risiko**, bukan hanya mengelola indeks. Inflasi dapat melonjak bukan karena ekonomi terlalu panas, tetapi karena pasokan terganggu, logistik tersendat, harga yang diatur perlu penyesuaian, atau base effect. Karena itu, strategi yang paling realistis adalah strategi berlapis:

Moneter yang kredibel: menjaga ekspektasi, stabilisasi rupiah untuk menahan imported inflation. ([Bank Indonesia](#))

Koordinasi TPIP–TPID yang operasional: 4K dan kebijakan pasokan antarwilayah. ([Bank Indonesia](#))

Administered prices yang bijak: timing–sequencing–magnitude agar inflasi tidak meledak dan daya beli tidak jatuh. ([Bank Indonesia](#))

Stabilisasi pangan dan perlindungan sosial: SPHP dan bantuan pangan terarah (Feb–Mar 2026) untuk menahan gejolak dan menjaga ketenangan sosial-ekonomi. ([Badan Pangan Nasional](#))

Reform struktural: memperkuat ketahanan pangan, logistik, dan data—agar inflasi makin “kebal” terhadap guncangan.

Jika Bapak menghendaki versi yang benar-benar mendekati **7.000 kata penuh**, saya bisa lanjutkan dengan (a) studi kasus tematik: beras–cabai–energi–kurs–bencana, (b) peta instrumen kebijakan per lembaga (BI, Kemenkeu, Kemendagri/TPID, Bapanas/Bulog), dan (c) lampiran ringkas “policy checklist” untuk modul perkuliahan.

reuters.com

reuters.com

Glosarium

Administered prices: Kelompok harga yang pembentukannya **dipengaruhi/diatur pemerintah** (mis. tarif tertentu), sehingga penyesuaiannya perlu mempertimbangkan *timing–sequencing–magnitude* agar tidak memicu gejolak inflasi. ([Bank Indonesia](#))

Base effect: Efek statistik ketika inflasi tahunan tampak naik/turun terutama karena pembandingan (harga periode tahun lalu) tidak “normal” (mis. ada diskon tarif/kejadian khusus). ([Bank Indonesia](#))

BI-Rate: Suku bunga kebijakan Bank Indonesia sebagai sinyal stance moneter untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan stabilitas makro. ([Bank Indonesia](#))

Buffer stock / cadangan penyangga: Stok komoditas (terutama pangan strategis) yang digunakan untuk **stabilisasi pasokan dan harga** ketika terjadi guncangan. ([Badan Pangan Nasional](#))

Cost-push inflation (dorongan biaya): Inflasi yang muncul karena kenaikan biaya produksi/distribusi (energi, logistik, input impor, gangguan cuaca) sehingga harga output ikut naik. ([Bank Indonesia](#))

Demand-pull inflation (tarikan permintaan): Inflasi yang didorong oleh permintaan agregat yang meningkat lebih cepat daripada kemampuan pasokan, sering menguat pada periode musiman seperti HBKN. ([Bank Indonesia](#))

DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward): Instrumen pasar valas domestik yang digunakan untuk **stabilisasi nilai tukar** dan mengelola volatilitas rupiah. ([Antara News Jawa Timur](#))

Exchange rate pass-through: Derajat seberapa kuat perubahan nilai tukar (kurs) “diteruskan” ke harga domestik melalui harga impor dan biaya input. ([Bank Indonesia](#))

Ekspektasi inflasi: Persepsi rumah tangga/pelaku usaha tentang inflasi masa depan; bila tidak terkendali dapat memicu kenaikan harga lanjutan (second-round effects). ([Bank Indonesia](#))

Guncangan pasokan (supply shock): Gangguan pada pasokan/produksi/distribusi (cuaca ekstrem, bencana, hambatan logistik) yang menimbulkan lonjakan harga. ([Bank Indonesia](#))

HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional): Periode musiman (mis. Ramadan–Idulfitri) yang biasanya meningkatkan permintaan, mobilitas, dan risiko tekanan harga—sehingga sering disertai stimulus/operasi stabilisasi. ([Media Keuangan](#))

IHK (Indeks Harga Konsumen): Indeks yang mengukur perubahan harga “keranjang konsumsi” rumah tangga; dasar penghitungan inflasi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Imported inflation: Tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga impor atau pelemahan kurs, sehingga biaya input dan harga domestik meningkat. ([Bank Indonesia](#))

Inflasi inti (core inflation): Komponen inflasi yang cenderung lebih persisten; sering dipakai untuk menilai tekanan permintaan dan ekspektasi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Inflasi m-to-m: Inflasi bulanan (bulan berjalan dibanding bulan sebelumnya). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Inflasi y-on-y: Inflasi tahunan (bulan berjalan dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Intervensi pasar valas (NDF/spot/DNDF): Langkah stabilisasi nilai tukar untuk meredam volatilitas dan membantu pencapaian sasaran inflasi. ([Antara News Jawa Timur](#))

Kebijakan campuran (policy mix): Kombinasi moneter–fiskal–sektoral (pangan, energi, logistik) yang terkoordinasi untuk menstabilkan inflasi dan menjaga pertumbuhan. ([Bank Indonesia](#))

Kelancaran distribusi: Pilar pengendalian inflasi yang menekankan logistik (angkutan, gudang, jalur distribusi antarwilayah) agar pasokan tidak tersendat. ([Bank Indonesia](#))

Komunikasi efektif: Pilar pengendalian inflasi untuk mengelola ekspektasi dan mencegah kepanikan; bagian dari kerangka kerja TPIP–TPID. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Kompensasi energi: Pembayaran pemerintah terkait penugasan/selisih biaya tertentu agar harga energi ke publik tetap terjangkau; sering dibahas bersama subsidi energi. ([Kemenkeu Media](#))

NDF (Non-Deliverable Forward): Instrumen lindung nilai valas (termasuk pasar offshore) yang dapat digunakan dalam strategi stabilisasi rupiah. ([Antara News Jawa Timur](#))

Perlindungan daya beli: Instrumen fiskal/bantuan (mis. bantuan pangan, diskon transport) untuk meredam dampak inflasi pada rumah tangga rentan, terutama saat HBKN. ([Bank Indonesia](#))

Sasaran inflasi (inflation target): Target resmi inflasi tahunan (rentang) yang menjadi jangkar kebijakan moneter dan koordinasi pengendalian inflasi. ([Bank Indonesia](#))

Second-round effects: Putaran kedua inflasi ketika kenaikan harga awal memicu penyesuaian upah/harga lebih luas sehingga inflasi menjadi lebih persisten. ([Bank Indonesia](#))

SPHP Beras: Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (beras) untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan melalui penyaluran beras pada ketentuan tertentu. ([Badan Pangan Nasional](#))

Subsidi energi: Dukungan fiskal untuk menjaga keterjangkauan energi; dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 tercantum sebagai komponen besar belanja subsidi. ([Kemenkeu Media](#))

TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah): Forum koordinasi pengendalian inflasi tingkat daerah, fokus pada pasokan, distribusi, dan operasi stabilisasi lokal. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat): Forum koordinasi nasional lintas lembaga untuk menjaga inflasi dalam sasaran, termasuk penyiapan langkah HBKN dan stabilisasi pangan/energi. ([Bank Indonesia](#))

Volatile food: Kelompok pangan bergejolak, dipengaruhi musim, cuaca, dan distribusi; TPIP menetapkan kisaran target volatile food tertentu untuk 2026. ([Bank Indonesia](#))

4K (Keterjangkauan–Ketersediaan–Kelancaran distribusi–Komunikasi): Kerangka operasional pengendalian inflasi (khususnya pangan) yang dipakai dalam sinergi pusat–daerah. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026, March 2). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen* (Berita Resmi Statistik/Press release).

([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, March). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Februari 2026* [PDF]. ([BPS Web API](#))

Bank Indonesia. (2026, January 6). *Inflasi IHK 2025 terjaga dalam sasaran* (News release). ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, January 30). *Pemerintah dan Bank Indonesia perkuat sinergi menjaga inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026* (News release/HLM TPIP). ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, February 2). *IHK Januari 2026 mengalami deflasi* (News release). ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, February 25). *BI-Rate tetap 4,75%: Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilisasi nilai tukar rupiah* (News release/RDG Februari 2026). ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (n.d.). *Target inflasi 2026: 2,5±1%* (Halaman indikator statistik). ([Bank Indonesia](#))

Badan Pangan Nasional. (2026, March 5). *Program SPHP Beras 2026 mulai digulirkan di Maret, ketentuan pembelian maksimal ditingkatkan* (Blog/siaran informasi). ([Badan Pangan Nasional](#))

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2026, January 3). *HLM TPIP: Pemerintah dorong penguatan pengendalian inflasi serta siapkan stimulus HBKN Ramadan dan Idulfitri* (Rilis publikasi). ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2026, February 12). *Sinergi TPIP dan TPID wilayah Sumatera perkuat pengendalian inflasi jelang Ramadan dan Idulfitri serta pemulihan ekonomi pascabencana* (Rilis publikasi). ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, July 2). *Nota Keuangan: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026—Buku II* [PDF]. ([Kemenkeu Media](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, March 3). *Stimulus Ramadan–Idulfitri 2026, Pemerintah kucurkan bantuan pangan bagi 35 juta keluarga penerima manfaat* (Media Keuangan). ([Media Keuangan](#))

Tim Pengendalian Inflasi Nasional. (2026, February 18). *Menjaga inflasi tahun 2026* [PDF]. ([TPIN](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 5 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a94b1b-12d8-83a1-9529-e5939d80f3c6>